

## TINJAUAN PROGRAM WORK HOLIDAY VISA DALAM MEMENUHI FUNGSI KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI LIBERALISME

*(THE URGENCY OF THE WORK HOLIDAY VISA PROGRAM IN FULFILLING  
IMMIGRATION FUNCTIONS BASED ON LIBERALISM THEORY PERSPECTIVE)*

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.603>

Submitted: 14-01-2024 Reviewed: 23-03-2024 Published: 02-04-2024

**Francisco David Subiyanto**  
[franciscodavidsinaga02@gmail.com](mailto:franciscodavidsinaga02@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Ferdyan Samuel Karunia**  
[ferdyansamuel20@gmail.com](mailto:ferdyansamuel20@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Ajeep Akbar Qolby**  
[ajeepakbar21@gmail.com](mailto:ajeepakbar21@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

### ABSTRAK

Program Work Holiday Visa (WHV) adalah program yang memungkinkan pemuda dari satu negara untuk tinggal dan bekerja sementara di negara lain dengan tujuan untuk belajar, mengenal budaya, dan berkontribusi secara ekonomi. Dalam konteks fungsi keimigrasian, WHV memiliki urgensi yang perlu dianalisis berdasarkan perspektif teori liberalisme. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi program WHV dalam memenuhi fungsi keimigrasian berdasarkan perspektif teori liberalisme. Pertama, ditekankan pentingnya perspektif liberalisme dalam konteks globalisasi dan integrasi antarnegara. Teori liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, pertukaran ekonomi, dan penghapusan hambatan yang menghalangi pergerakan orang dan modal antarnegara. Kedua, dianalisis urgensi program WHV sebagai instrumen kebijakan yang mempromosikan pertukaran budaya, peningkatan pemahaman antarnegara, dan kerja sama ekonomi. Program WHV memungkinkan pemuda untuk mengalami kehidupan di negara lain, meningkatkan toleransi, memperluas jaringan internasional, dan membangun hubungan bilateral yang erat. Selanjutnya, perhatian diberikan pada dampak ekonomi dari program WHV. Dengan memberikan kesempatan kerja sementara kepada pemuda asing, program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Pemuda asing dapat memperkaya tenaga kerja, mengisi kekurangan keterampilan, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Selain itu, dianalisis juga implikasi program WHV dalam konteks pengendalian imigrasi. Dalam perspektif liberalisme, program ini mencerminkan pendekatan selektif yang memprioritaskan individu yang bermanfaat dan berkontribusi bagi negara tujuan. Meskipun program WHV dapat memberikan keuntungan, penting untuk memperhatikan risiko penyalahgunaan, misalnya penyalahgunaan tenaga kerja asing atau masalah keamanan terkait dengan perjalanan antarnegara. Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi urgensi program WHV berdasarkan perspektif teori liberalisme. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi program WHV dalam konteks fungsi keimigrasian, termasuk aspek budaya, ekonomi, dan pengendalian imigrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan program WHV dalam mendukung hubungan internasional dan kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme.



## ABSTRACT

*The Work Holiday Visa (WHV) program is a program that allows youth from one country to temporarily live and work in another country with the aim of studying, getting to know the culture, and contributing economically. In the context of the immigration function, WHV has an urgency that needs to be analyzed based on the perspective of liberalism theory. This analysis aims to explore the urgency of the WHV program in fulfilling the immigration function based on the perspective of liberalism theory. First, the importance of the perspective of liberalism in the context of globalization and integration between countries is stressed. Liberalism theory emphasizes the importance of individual freedom, economic exchange, and the removal of barriers that impede the movement of people and capital between countries. Second, it analyzes the urgency of the WHV program as a policy instrument that promotes cultural exchange, increased understanding between countries, and economic cooperation. The WHV program enables youth to experience life in other countries, increase tolerance, broaden international networks, and build close bilateral relations. Next, attention is paid to the economic impact of the WHV program. By providing temporary employment opportunities to foreign youths, this program can make a positive contribution to economic growth for both countries of origin and destination countries. Foreign youth can enrich the workforce, fill skills gaps, and support sectors of the economy in need. In addition, the implications of the WHV program in the context of immigration control are also analyzed. In the perspective of liberalism, this program reflects a selective approach that prioritizes individuals who are useful and contribute to the destination country. While WHV programs can provide benefits, it is important to be mindful of the risks of abuse, for example abuse of foreign workers or security concerns related to interstate travel. In this analysis, an evaluation of the urgency of the WHV program is carried out based on the perspective of liberalism theory. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of the urgency of the WHV program in the context of the immigration function, including cultural, economic and immigration control aspects. The resulting recommendations can be used to improve and optimize the WHV program in supporting international relations and national interests based on the principles of liberalism.*

## A. PENDAHULUAN

Dunia detik ini sudah menjajaki era globalisasi yang ditandai dengan semakin terhubungnya antar negara di seluruh dunia ini, hal tersebut kemudian menimbulkan suatu Kerjasama diantara negara-negara yang ada di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan di negaranya masing-masing. Hal tersebut kemudian ditandai dengan berbagai Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini baik itu bersifat multilateral, ataupun bilateral. Kerjasama internasional ini kemudian dapat kita kaji dari sudut pandang teori liberalisme yang sangat mengutamakan pertumbuhan ekonomi, Kerja sama antar negara serta unifikasi regional. Lewat adanya paham liberalisme kemudian para negara melakukan Kerjasama internasional yang mana nantinya akan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak, hal ini kemudian akan menciptakan suatu system perdagangan bebas yang mana kemudian setiap negara akan saling berketergantungan satu sama lainnya.

Indonesia sendiri telah banyak melakukan Kerjasama internasional dengan banyak negara mulai dari Kerjasama mencakup multilateral seperti halnya Indonesia tergabung dalam APEC, OPEC, dan ASEAN, kemudian dalam Kerjasama bilateral Indonesia sendiri telah melakukan Kerjasama dengan negara Filipina, Taiwan, Tiongkok, Australia dan masih banyak

lagi. Pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Pemerintah Australia yaitu pemberian Work Holiday Visa bagi warga negara Indonesia yang terqualifikasi dalam usia produktif. Work Holiday Visa sendiri merupakan suatu fasilitas yang diberikan pemerintah Australia untuk pemuda serta pemudi yang ada di Indonesia yang berminat untuk bekerja dan sambil berlibur di Indonesia. Selain dengan Indonesia kerja sama ini sendiri telah dilakukan Australia Bersama dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, China , Jepang, Inggris, Korea Selatan dan beberapa lainnya. *Work Holiday Visa* (WHV) sendiri merupakan suatu skema Kerjasama bilateral yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Skema ini sendiri bertujuan untuk mendorong pertukaran budaya, mengisi kekosongan pekerjaan di Australia dan meningkatkan hubungan orang perorangan antara masyarakat Australia dengan Indonesia.

Kuota yang diberikan oleh pemerintah Australia sendiri dimulai dari 100 visa per tahun kemudian bertambah pada kurung waktu 2013 sampai 2020, menjadi 1000 visa per tahun. Hingga kemudian pada tahun ini menjadi 5000 kuota visa per tahun. Hal ini sendiri berjalan seiring dengan berlangsungnya Kerjasama antara Australia dengan Indonesia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kerjasama ini sendiri merupakan bentuk Kerjasama ekonomi yang dilakukan pemerintah Australia dengan Indonesia, namun seiring berjalannya waktu kerja sama ini juga menjadi alat untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Australia dalam bidang politik, keamanan, pembangunan masyarakat, maritime, pendidikan serta hubungan people to people antara Indonesia dengan Australia. Selain dari itu kedua negara ini juga ingin menciptakan suatu rantai nilai global yaitu mata rantai bisnis atau produk yang menghubungkan suatu produk dari hulu hingga hilir yaitu mulai dari produsen, pengolah, pemasok hingga konsumen akhir dalam skala internasional.<sup>1</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang muncul atau sebagaimana adanya.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah Metode pengumpulan data dengan melakukan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam melakukan penelitian yang membahas kegiatan atau perilaku social atau fungsionalisme, penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan. Dengan melalui pencarian data perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi akan mendapatkan data penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> Anita Herlina. *Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA*. NeoRepublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2 (2021) hal : 117

Pada awalnya sendiri skema *Work Holiday Visa* ini bukan termasuk dalam skema Kerjasama IA-CEPA, namun pada akhirnya Indonesia dengan Australia sepakat memasukan skema ini menjadi salah satu fasilitas keimigrasian dalam skema kerja sama IA-CEPA. Melalui program WHV ini sendiri setiap pemegang visa tersebut memiliki hak untuk berlibur dan bekerja di Australia dengan catatan disana WNI pemegang WHV harus mencari pekerjaannya sendiri disana. Untuk dapat mendapatkan WHV ini sendiri orang Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan tidak bisa langsung mendaftar saja. Skema Work Holiday Visa sendiri diatur dalam Permenkumham No. 51 Tahun 2016 yang mana indeks visanya adalah C320. WHV sendiri hanya diperuntukkan untuk orang dengan rentang usia minimal 18 tahun sampai 30 tahun dengan pendidikan minimal Diploma Tiga (D3). Kemudian untuk dapat mendaftar sendiri warga negara Indonesia harus mengajukan surat rekomendasi pemerintah Indonesia (SPRI) dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk dapat mengajukannya WNI harus memenuhi persyaratan pengajuan, dilansir dari laman *imigrasi.go.id*, ini merupakan persyaratan dari pengajuan SPRI untuk menjadi syarat WHV yang akan diajukan ke kedutaan Australia di Indonesia :

1. Sudah berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 30 tahun pada saat pengajuan permohonan surat rekomendasi
2. Memiliki kualifikasi setara perguruan tinggi minimal D3
3. Belum pernah mengikuti program WHV sebelumnya
4. Memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan
5. Memiliki sertifikat IELTS dengan skor minimal 4,5
6. Memiliki deposit dana simpanan di bank sebesar minimal setara AUD 5.000

Program ini sendiri dapat memberikan keuntungan dari kedua negara yang mana lewat skema ini sendiri dapat menguntungkan warga negara Indonesia yang ingin mencari pekerjaan, yang mana seperti kita ketahui sendiri bahwa lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia sendiri tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin massif peningkatannya yang mana jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak kepada tingkat kemiskinan di negara Indonesia yang semakin meningkat. saat ini sendiri gaji minimum dari pekerja yang ada di Australia termasuk para pemegang WHV adalah AUD 19, 49 atau sekitar Rp. 206. 200 (kurs 10.580) per jamnya, yang mana dengan upah minimum saja seorang pekerja di Australia dapat medapatkan gaji selama satu minggu senilai Rp 7, 6 juta sampai dengan Rp 30, 4 juta perbulan.<sup>2</sup> Tentunya hal ini sangat menggiurkan bagi para WNI yang ingin bekerja di luar negeri dan tentunya hal ini juga dapat mengurangi beban negara, visa ini sendiri berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang di tahun kedua.<sup>3</sup>

Jika kita tilik dari perspektif liberalisme, liberalisme sendiri mempunyai pandangan bahwa hubungan internasional memiliki sifat kooperatif, yang mana liberalisme mengedepankan Kerjasama, liberalisme juga menjunjung tinggi kebebasan dan kemajuan dari individunya masing-masing, yang mana kemudian individu ini akan membuat suatu kelompok yang dapat menguntungkan satu sama lainnya kemudian dapat menyatukan kepentingannya Bersama, begitupun dengan negara yang mana terbentuk dari individu-individu yang kemudian

---

<sup>2</sup> Kompas.com. Mengenal WHV, Kerja Sambil Berlibur di Australia. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 20.21 WIB

<sup>3</sup> Australian Government, "PLAN OF ACTION for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020- 2024)," *Www.Dfat.Gov.Au* 5, no. 1 (2020): 55, <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024>.

berkelompok hingga kemudian membentuk suatu negara yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketika suatu negara melakukan hubungan internasional maka Kembali negara tersebut dapat dianggap sebagai suatu individu yang kemudian melakukan Kerjasama yang kemudian membentuk suatu kepentingan Bersama. Hal ini kemudian dilakukan dikarenakan menurut paham liberalisme untuk mencapai suatu kedamaian tidak perlu selalu dengan menggunakan peperangan, namun dapat menggunakan alat Kerjasama antar negara yang menjadi poin disini adaa untuk mencapai suatu kedamaian, biasanya pendekatan yang dilakukan berdasarkan paham liberalisme adalah menggunakan pendekatan ekonomi, dengan ekonomi kemudian dapat membentuk suatu sirkulasi saling ketergantungan satu sama lain, yang mana ketika ketergantungan ini selalu terpenuhi maka perdamaian itu sendiri akan terus berjalan.<sup>4</sup>

Dengan adanya fasilitas *Work Holiday Visa* ini kemudian jika ditinjau dari sudut pandang teori liberalisme bahwa Indonesia dan Australia telah sama sama diuntungkan dalam Kerjasama ini hal ini dapat dibuktikan melalui imigrasi sendiri yang menjadi representative negara Indonesia yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah Australia untuk warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan WHV telah melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan masyarakat, yaitu melalui pemberian pengaturan terkait dengan mendukung perpindahan modal manusia (*transfer of human capital*).<sup>5</sup> Selain dari hal tersebut hal ini juga dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia, serta semakin eratnya hubungan orang perorangan antara Indonesia. Kemudian keuntungan dari Australia sendiri adalah Australia melihat bahwa Indonesia memiliki indeks penduduk usia produktif yang besar, yang mana hal ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh Australia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja yang ada di Australia, yang berdasarkan persyaratan dari pemerintah Australia pemegang WHV dapat bekerja di sector perkebunan dan pertanian.

Mekanisme *Work Holiday Visa* (WHV) antara Indonesia dan Australia memungkinkan warga negara Indonesia untuk bekerja dan berlibur di Australia, dan sebaliknya, warga negara Australia juga dapat melakukan hal yang serupa di Indonesia. Berikut adalah mekanisme umum WHV antara Indonesia dan Australia:

1. Persyaratan Umum:

- Usia: Pemohon WHV Indonesia harus berusia antara 18 hingga 30 tahun pada saat mengajukan permohonan.
- Kewarganegaraan: Pemohon harus memiliki kewarganegaraan Indonesia.
- Pendidikan: Pemohon harus memiliki kualifikasi setara dengan minimal Diploma Tiga (D3).
- Paspor: Pemohon harus memiliki paspor yang masih berlaku setidaknya selama 12 bulan.

2. Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia (SPRI):

- Pemohon harus mengajukan SPRI kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai persyaratan untuk mengajukan WHV.
- SPRI mengkonfirmasi bahwa pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

3. Pengajuan Visa:

---

<sup>4</sup> Lloyd steans, jill dan Pettiford, *Hubungan Internasional, Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun VIII, 2009, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhib3896c2780full.pdf>.

<sup>5</sup> Anita Herlina, Op. Cit. , hal : 128

- Setelah SPRI diterbitkan, pemohon dapat mengajukan WHV ke Kedutaan Australia di Indonesia.
  - Proses pengajuan melibatkan pengisian formulir aplikasi, pembayaran biaya visa, dan pengumpulan dokumen pendukung seperti salinan paspor, sertifikat IELTS (dengan skor minimal 4,5), dan bukti dana simpanan minimal setara dengan AUD 5.000 di bank.
4. Penilaian dan Keputusan Visa:
- Kedutaan Australia akan menilai dan memproses aplikasi WHV pemohon.
  - Keputusan visa akan diberikan setelah penilaian aplikasi selesai.
5. Durasi dan Perpanjangan Visa:
- WHV antara Indonesia dan Australia berlaku selama 1 tahun.
  - Visa ini dapat diperpanjang untuk tahun kedua jika pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Visa:
- Pemegang WHV memiliki hak untuk bekerja dan berlibur di negara tujuan.
  - Pekerjaan yang diperbolehkan biasanya terkait dengan sektor perkebunan dan pertanian di Australia.
  - Pemegang visa juga diharapkan mematuhi peraturan imigrasi dan hukum setempat.

Dalam kerangka liberalisme, kerja sama internasional dianggap sebagai suatu cara untuk mencapai perdamaian dan kemajuan melalui saling ketergantungan. Dalam konteks skema Work Holiday Visa antara Indonesia dan Australia, kedua negara telah saling menguntungkan. Pertama, skema ini memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Di Indonesia, lapangan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Dengan adanya kesempatan bekerja di Australia melalui WHV, para pemegang visa dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Gaji minimum untuk pekerja di Australia, termasuk pemegang WHV, adalah AUD 19,49 per jam. Hal ini sangat menggiurkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dan dengan penghasilan yang diperoleh, mereka dapat mengurangi beban kemiskinan di negara asalnya. Kedua, dari perspektif Australia, negara ini melihat potensi besar dalam jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Dengan adanya WHV, Australia dapat memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia untuk mengisi kekosongan dalam sektor perkebunan dan pertanian. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Australia sambil memberikan peluang pekerjaan bagi WNI. Dalam teori liberalisme, kerja sama internasional berfokus pada kebebasan individu dan kemajuan bersama. Negara-negara melakukan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dan memperkuat hubungan antarindividu. Dalam hal ini, WHV merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengedepankan kepentingan individu dan negara secara bersamaan.<sup>6</sup>

Work Holiday Visa (WHV) memiliki beberapa keuntungan bagi pemegang visa dan negara yang menerapkan program ini, seperti Indonesia dan Australia. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari WHV:

---

<sup>6</sup> Yetty Komalasari Dewi and Wenny Setiawati, "A Critique Towards Australian Work and Holiday Visa Subclass 462: Where Does It Leave Indonesian Citizen?," *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 3 (2020): 387–412.

1. Kesempatan untuk Berlibur dan Bekerja: WHV memberikan kesempatan bagi pemegang visa untuk menjelajahi negara tujuan sambil bekerja secara sementara. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman budaya, menjelajahi tempat-tempat menarik, dan memperluas wawasan mereka tentang negara tersebut.
2. Pengembangan Keterampilan dan Pengalaman: WHV memungkinkan pemegang visa untuk bekerja di sektor-sektor tertentu yang telah ditentukan. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan baru, memperoleh pengalaman kerja internasional, dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Pengalaman ini dapat menjadi nilai tambah dalam karier mereka di masa depan.
3. Pertukaran Budaya dan Persahabatan Antar Negara: WHV menciptakan kesempatan untuk pertukaran budaya dan persahabatan antara pemegang visa dari negara yang berbeda. Mereka dapat terlibat dalam interaksi sosial dengan penduduk lokal dan dengan pemegang WHV dari negara-negara lain, sehingga memperluas jaringan sosial dan mempromosikan pemahaman lintas budaya.
4. Manfaat Ekonomi bagi Negara Tujuan: WHV dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi negara tujuan. Pemegang visa dapat mengisi kekosongan tenaga kerja sementara di sektor-sektor tertentu yang membutuhkan, seperti sektor perkebunan atau pariwisata. Hal ini membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
5. Peningkatan Pariwisata dan Industri Perhotelan: WHV dapat memberikan dorongan bagi industri pariwisata dan perhotelan di negara tujuan. Pemegang visa seringkali menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan kegiatan rekreasi, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan.
6. Pembangunan Hubungan Bilateral: Program WHV dapat memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat. Ini menciptakan kesempatan untuk kerjasama lebih lanjut dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, dan ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa keuntungan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan ketentuan yang diterapkan oleh negara tujuan. Selain itu, pemegang WHV juga perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga integritas program dan memastikan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, program Work Holiday Visa (WHV) juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan umum dari WHV:

1. Batasan Usia dan Kualifikasi Pendidikan: WHV umumnya hanya tersedia untuk pemegang paspor dalam rentang usia tertentu, misalnya 18 hingga 30 tahun. Hal ini membuat beberapa individu yang berada di luar batasan usia atau belum memenuhi persyaratan pendidikan tertentu tidak dapat mengambil keuntungan dari program ini.
2. Durasi Terbatas: WHV biasanya memiliki durasi yang terbatas, misalnya satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan di tahun kedua. Durasi yang terbatas ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang berencana untuk tinggal atau bekerja lebih lama di negara tujuan.

3. Batasan Pekerjaan dan Penghasilan: Pemegang WHV sering kali dibatasi dalam jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Mereka mungkin hanya diizinkan bekerja dalam sektor-sektor tertentu atau dengan batasan waktu tertentu. Selain itu, mereka mungkin menghadapi batasan dalam penghasilan yang dapat mereka peroleh, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka selama tinggal di negara tujuan.
4. Keterbatasan Akses ke Program Sosial: Pemegang WHV mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengakses beberapa program sosial atau tunjangan yang tersedia untuk penduduk lokal atau pemegang visa kerja jangka panjang. Ini dapat menyulitkan mereka dalam hal perlindungan sosial atau keamanan finansial dalam situasi darurat.
5. Keterbatasan Mobilitas: Pemegang WHV biasanya memiliki keterbatasan dalam mobilitas geografis. Mereka mungkin diwajibkan untuk tinggal atau bekerja di wilayah tertentu dan memiliki batasan perjalanan antar wilayah. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas mereka dalam menjelajahi negara tujuan atau mengejar peluang kerja yang lebih baik.
6. Tantangan Budaya dan Bahasa: Tinggal dan bekerja di negara asing dengan budaya dan bahasa yang berbeda dapat menjadi tantangan bagi pemegang WHV. Anak muda yang baru pertama kali tinggal jauh dari keluarga dan lingkungan asal mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengatasi perbedaan budaya.

Penting untuk memperhatikan bahwa setiap program WHV memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda, dan kekurangan yang disebutkan di atas mungkin tidak berlaku secara universal. Pemegang WHV perlu memahami dan mematuhi aturan yang berlaku serta mempersiapkan diri dengan baik sebelum memutuskan untuk mengambil keuntungan dari program ini.

Dalam konteks WHV, pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Australia untuk WNI yang ingin mendapatkan visa tersebut. Tindakan ini memfasilitasi transfer modal manusia antara kedua negara dan membantu dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memperkuat hubungan antarindividu antara Indonesia dan Australia. Secara keseluruhan, skema Work Holiday Visa antara Indonesia dan Australia memberikan manfaat bagi kedua negara. Dalam perspektif liberalisme, kerja sama ini mencerminkan prinsip-prinsip saling ketergantungan dan kebebasan individu yang mengarah pada perdamaian dan kemajuan bersama.<sup>7</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari kajian tersebut kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah program fasilitas keimigrasian Work Holiday Visa ini telah memenuhi fungsi keimigrasian

---

<sup>7</sup> Izzu Khizbil Mughist, *Kepentingan Nasional Indonesia Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ia-Cepa) Tahun 2020, 2021*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60788>.

Indonesia berdasarkan perspektif liberalisme yaitu fasilitator pembangunan masyarakat yang mana dengan fasilitas WHV ini kemudian dapat memberikan kebebasan individu bagi warga negara Indonesia yang ingin mencoba peruntungan bekerja di luar negeri yang mana kemudian hal ini juga dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara, kemudian keuntungan dari Australia sendiri keimigrasian mereka berhasil membantu pemerintah mengisi kekosongan tenaga kerja yang ada di negara mereka, sehingga jika ditilik dari perspektif liberalisme yang mana hubungan internasional memiliki sifat koperatif maka hal ini cukup memiliki peranan yang penting dan telah berhasil memenuhi tujuan perdamaian diantara kedua negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dugis, Vinsensio. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif – Perspektif Klasik*. Surabaya: Revka Petra Media.

- Ensiklopedia Dunia. *Teori Hubungan Internasional*. Universitas Stekom Pusat. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori\\_hubungan\\_internasional](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori_hubungan_internasional). Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 19.23 WIB.
- Herlina, Anita. (2021). Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRepublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, hal 115-134.
- Imigrasi.go.id. <https://www.imigrasi.go.id/id/faq-srpi-whv/#1627366160806-4c05949b-3269>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 Pukul 19.50 WIB.
- Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.
- Kompas.com. (2021, Agustus 15). *Mengenal WHV, Kerja sambil berlibur di Australia*. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/08/15/101351026/mengenal-whv-kerja-sambil-berlibur-di-australia?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 20.21 WIB.
- Maghfiratunisa Haq. (2016). *Persaingan Lazada Dan Rakuten Dalam Menguasai Pasar E-Commerce Di Indonesia Periode 2012-2014*. Skripsi Thesis. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.